



## DEKONSTRUKSI ANTOLOGI PUISI *SORI GUSTI* KARYA DARMANTO JATMAN *Deconstruction of Sori Gusti's Poetry Anthology by Darmanto Jatman*

**Rina Zuliana**

Universitas Gadjah Mada

Bulaksumur, Caturtunggal, Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

*rinazuliana@mail.ugm.ac.id*

Naskah Diterima Tanggal 2 Juli 2021—Direvisi Akhir Tanggal 1 Juni 2022—Disetujui Tanggal 6 Juni 2022

doi: <https://doi.org/10.26499/jentera.v11i1.3840>

### Abstrak

Tulisan ini membahas dekonstruksi struktur linguistik, bentuk, dan isi dalam kumpulan puisi *Sori Gusti* karya Darmanto Jatman. Tujuannya untuk mengungkap hal ihwal di balik bentuk dan isi teks puisi Sori Gusti dengan menggunakan strategi pembacaan Dekonstruksi Derrida. Pemanfaatan multilingualitas dalam teks untuk meniadakan pusat (*decentering*) dalam penggunaan konsep bahasa, baik antara bahasa lokal dengan bahasa asing, maupun antarposisi bahasa lainnya. Pembalikan dan pengaburan oposisi bahasa tersebut mengarah pada pendamaian budaya yang terepresentasi dalam teks sebagai bentuk keberagaman. Dari segi tipografi puisi dan peniadaan atau pengaburan pusat (*decentering*) melalui penggunaan bentuk pidato yang dituturkan oleh *aku lirik* sebagai suara inferior. Pada konvensi umumnya pidato memiliki konsep vertikal, tuturan pemimpin kepada rakyatnya, kemudian dikaburkan dengan konsep horisontal (garis setara). Konsepsi vertikal-horisontal kemudian diformulasikan untuk mengungkap muatan politis di balik teks, yakni neoimperialisme Orde Baru.

**Kata-kata kunci:** dekonstruksi, oposisi biner, *decentering*, *Sori Gusti*

### Abstract

*This paper discussed the deconstruction of linguistic structures, forms, and contents in an anthology of Sori Gusti's poems by Darmanto Jatman. The aim was to reveal the things behind the form and content of Sori Gusti's poetry text by using the strategy of reading Derrida's Deconstruction. The use of multilinguality in the text to decentering in the use of the concept of language, between local languages and foreign languages, as well as between other language opposition. The reversal and obscurity of the opposition of the language led to the reconciliation of culture represented in the text as a form of diversity. In terms of typography poetry, negation or obscurity of the center (decentering) through the use of the form of speech spoken by "aku lirik" as an inferior voice. At conventions generally speeches had a vertical concept, the speech of the leader to his people, then obscured by a horizontal concept (equivalent line). The vertical-horizontal conception was then formulated to reveal the political content behind the text, neo-imperialism of Orde Baru regim.*

**Keywords:** deconstruction, binary opposition, *decentering*, *Sori Gusti*

**How to Cite:** Zuliana, Rina. (2022). Dekonstruksi Antologi Puisi *Sori Gusti* Karya Darmanto Jatman. *Jentera: Jurnal Kajian Sastra*, 11(1), 110—123. doi: <https://doi.org/10.26499/jentera.v11i1.3840>

---

### PENDAHULUAN

Perkembangan karya sastra Indonesia dari masa ke masa hadir menyesuaikan semangat zamannya. Memasuki tahun 1980 karya sastra tidak hanya berfokus pada isu-isu sosial dan politik, gaya dan pola-pola baru mulai diperhatikan dan diterapkan oleh beberapa karya sastra kontemporer. Kebaharuan konvensi mulai diperhatikan untuk mengatasi permasalahan pembredelan karya yang

terjadi pada masa Orde Baru. Setiap karya yang secara vokal dalam menyampaikan kritik akan terancam keberadaannya. Foulcher (Foulcher, 2020) mengatakan bahwa perkembangan awal sastra Indonesia di masa Orde Baru adalah pemekaran karya-karya sastra yang tidak mendapat tempat pada tahun 1960-1965. Apabila pada awal 1965 sastra Indonesia memperhatikan isu sosial politik, usaha mencari mode representasi yang cocok untuk fiksi diperbarui pada awal 1970. Oleh karena itu, pemutakhiran konvensi karya sastra dilakukan untuk mempertahankan tumbuh kembang karya sastra agar terhindar dari pembredelan yang dilakukan oleh Orde Baru, sehingga muncul karya-karya sastra yang menyuarakan kritik secara simbolik.

Dalam perkembangannya banyak sastrawan mendokumentasikan sejarah Orde Baru tidak hanya dalam bentuk karya sastra prosa, tetapi juga puisi. Kelahiran karya-karya tersebut adalah upaya kritik atas kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Orde Baru sebagai tragedi paling besar dalam sejarah kemanusiaan di Indonesia, seperti karya-karya Subagio Sastrowardoyo dalam *Daerah Perbatasan* (Sastrowardoyo, 1982) yang menampilkan Orde Baru secara simbolik. Karya W.S. Rendra seperti *Potret Pembangunan dalam Puisi* (Rendra, 1980), karya Wiji Thukul dalam *Aku Ingin Jadi Peluru* dan *Nyanyian Akar Rumput* (Thukul, 2004, 2014), kedua penyair tersebut seringkali menampilkan Orde Baru secara vokal.

Munculnya *Sori Gusti* karya Darmanto Jatman dalam dunia sastra Indonesia, memberi kesegaran baru bagi khasanah kesusastraan Indonesia mutakhir. Selain ditulis dalam konvensi yang berbeda dari puisi-puisi sebelumnya, *Sori Gusti* semacam rangkaian *puzzle* yang menampakkan alur pergerakan sebuah sejarah Orde Baru. Hadirnya *Sori Gusti* juga diwarnai dengan adanya kebaharuan-kebaharuan gaya penulisan puisi yang ditawarkan oleh Darmanto Jatman. Darmanto Jatman menggunakan multilingual yang terdiri atas pemilihan diksi dari beberapa bahasa lokal dan global.

Kebaharuan konvensi dalam *Sori Gusti* tidak dimiliki oleh puisi-puisi semasanya. Kebaharuan ini dapat dilihat dari muatan multilingualitas dan konsep pidato yang dipinjam sebagai bentuk teks puisi. Konsep multilingualitas dalam sastra Indonesia banyak ditemukan dalam karya sastra bergenre prosa, tetapi jarang ditemukan dalam genre puisi. Fenomena multilingualitas dalam *Sori Gusti* tidak sebatas mewakili pembaharuan konvensi dalam bentuk struktur teksnya saja, pemanfaatan multilingualitas sebagai upaya kritik untuk menyampaikan artikulasi khusus yang tidak dapat diekspresikan melalui pemanfaatan bahasa Indonesia saja. Begitu pula konsep pidato dalam bentuk teks *Sori Gusti*, tidak sekadar memberi konsep baru dalam bentuk struktur teks. Konsep pidato dihadirkan berbalik dengan konsep pidato pada umumnya. Konsep pidato memiliki garis kepentingan dilihat dari subjek dan objek yang dihadirkan dalam teks tersebut.

Dari 165 puisi yang ditulis Darmanto Jatman dalam *Sori Gusti*, unsur multilingualitas dan konsep pidato menampakkan adanya muatan neoimperialisme yang memiliki kecenderungan yang dominan dalam isi kumpulan puisi ini. Adanya pengaluran sejarah Orde Baru dalam *Sori Gusti* serta muatan neoimperialisme di dalamnya, dapat saja kehadirannya dinilai sebagai dokumentasi perjalanan sejarah pada zamannya, mengingat *Sori Gusti* terbit di tahun 2002 setelah rezim Orde Baru berakhir. Dalam kajian ini diambil beberapa sampel puisi, yakni jejak-jejak dekonstruksi yang terdapat dalam teks puisi “Pidato Ki Lurah Karangkedempel Sewaktu Menerima Mahasiswa KKN di Desanya” (1980); “Meener Trans, Mevrouw Trans, Matur Nuwun, Dank U Well, Terima Kasih, Thank You” (1995); “Harmoni Itu Sepasang Sandal Jepit”; “Amanat Buat Mereka yang Pindah Abad”; dan “Hong Wilaheng Niaingsun Memayu Hayuning Bangsa dan Negara” (2001).

Tulisan ini bertujuan untuk mengungkap jejak-jejak dekonstruksi melalui penggunaan multilingualitas dan konsep pidato dalam teks. Tujuan selanjutnya yakni mendekonstruksikan kedua aspek tersebut dikaitkan dengan wacana sejarah untuk mengungkap kritik atas kehadiran neoimperialisme kemudian melacak makna dari hasil dekonstruksi. Peneliti memilih kumpulan puisi *Sori Gusti* sebagai objek penelitian karena beberapa alasan yang telah dikemukakan di atas. Pemilihan ini didasarkan atas kesamaan penggunaan multilingualitas, konsep pidato sebagai bentuk teks, dan adanya alurisasi sejarah yang berulang ditampakkan dalam teks. Maka dari itu, peneliti memanfaatkan

teori dekonstruksi Jacques Derrida untuk melihat permasalahan teks yang perlu dikaji secara kritis dan mendalam untuk mengungkap jejak-jejak dekonstruksi dan pembongkaran atas oposisi biner untuk mendapatkan makna dari hasil dekonstruksi tersebut.

## LANDASAN TEORI

Dalam bukunya *De La Grammatologie* (1967) atau *of Grammatology* (terjemahan oleh Gayatri Spivak), Derrida melakukan penyelidikan hubungan antara ucapan dan tulisan yang berkembang menjadi bentuk bahasa. Dekonstruksi Derrida menentang adanya logosentrisme dan fonosentrisme. Derrida mengkritik bahasa yang dikonsepsikan oleh Saussure. Derrida berpendapat bahwa tulisan sering dianggap berasal dari ucapan, sikap ini tecermin dari penemuan filosofis dan ilmiahnya tentang asal bahasa. Derrida mengatakan bahwa kecenderungan untuk menganggap tulisan sebagai ungkapan dari bahasa lisan (tuturan) telah menyebabkan anggapan bahwa bahasa lisan lebih dekat pada kebenaran dibanding bahasa tulisan. Perkembangan bahasa terjadi melalui interaksi antara bahasa lisan dan tulisan, dan karena interaksi inilah, tidak ada dari keduanya yang dapat digambarkan lebih penting untuk perkembangan bahasa. Pada tahapan inilah Derrida mendahulukan bahasa tulisan dibanding bahasa lisan (Derrida, 2016: 75).

*In a classical philosophical oppotion we are not dealing with the peaceful coexistence of a vis-à-vis, but rather with a violent hierarchy. One of the two terms govern the other (axiologically, logically, etc). or has the upper hand. To deconstruct the opposition, first of all, is to overturn the hierarchy at a given moment.*  
(Derrida, 2016: 115).

Melalui *Of Grammatology*, Derrida melakukan dekonstruksi terhadap tradisi metafisika Barat untuk mengkritik fenomenologi Husserlian, Strukturalisme Saussure, dan lainnya. Derrida menggunakan metode penjelasannya dengan mendekonstruksikan berbagai teks di beberapa bidang seperti linguistik (pemikiran Saussure dalam linguistik umum), antropologi Levi-Strauss, dan filsafat (esai Rousseau tentang asal usul bahasa)(Derrida, 2016: 105). Derrida mendekonstruksi terhadap hierarki yang menindas kemudian membalikkannya.

Dekonstruksi Derrida membahas mengenai konsep *différance* menjadi *differance* dan prioritasnya terhadap tulisan dibanding percakapan karena tulisan adalah bahasa yang maksimal dan tulisan tidak hanya pada pikiran manusia tetapi nyata ada di atas halaman. Konsep *differance* dalam prinsip jejak menggunakan ejaan *-ance* sebagai pengganti *-ence*. Dalam kata kerja Perancis istilah tersebut gabungan dari dua arti dari kata kerja. Konsep *differance* kemudian masih dibagi lagi menjadi tiga disesuaikan kata kerjanya, yakni *to differ* yang berarti ‘untuk membedakan’, *to differe* yang artinya ‘untuk menyebarkan’, dan *to defer* yang berarti ‘menunda’ (Norris, 2003: 79)

Cara kerja teks dekonstruksi yaitu melalui pembacaan ganda atas teks, yakni dengan mengajukan terminologi teks yang bersifat biner, melakukan pelacakan terhadap jejak sehingga terungkap oposisi biner dalam teks. Kedua yaitu memperlihatkan kelemahan-kelemahan teks. Dekonstruksi masuk untuk membongkar, membalikkan, menunda, menghancurkan, atau mengaburkan istilah-istilah terdominasi. Bagi Derrida, mendekonstruksikan suatu oposisi adalah membalikkan hierarki. Langkah berikutnya yang harus dilakukan adalah pembalikan terhadap sistem keseluruhan yang di dalamnya oposisi menjadi bagian dengan menunjukkan Bagaimana wacana merusak oposisi hierarki yang ada (Jabarohim, 2003: 182-183).

Ada dua lagi dari cara kerja skeptis Derrida yang penting dalam dekonstruksi. Pertama yakni usahanya menunjukkan bahwa batas atau margin tetap atas sebuah karya tekstual tidak dapat ditetapkan dengan maksud untuk membedakan apa yang di dalam dengan apa yang di luar. kedua, yaitu analisisnya terhadap ketidaklogisan inheren, atau retorika ketergantungan yang tidak dapat dihindarkan dari *rhetorical figures* dan *figurative language* dalam semua pemakaian bahasa, termasuk argumen-argumen dalam filsafat.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif sesuai dengan cara kerja teori dekonstruksi. Moleong (2011: 8–13) menjelaskan metode kualitatif deskriptif sebagai model penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan model statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Terdapat dua hal penting yang perlu diperhatikan dalam penentuan metode yang digunakan di dalam suatu penelitian, yaitu metode dan teknik pengumpulan data serta metode analisis data (Faruk, 2012, p. 25). Sebagai sebuah cara ataupun teknik, metode dan teknik pengumpulan data berfungsi sebagai pengumpul fakta empirik yang berkaitan dengan masalah penelitian, sementara fungsi metode analisis data bertumpu pada perannya dalam mencari hubungan antardata, yang hubungan tersebut tidak akan dinyatakan dengan sendirinya oleh data terkait. Penelitian ini merupakan penelitian sastra dengan menggunakan pendekatan metode penelitian berupa metode deskriptif analitis.

Data dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan berbentuk angka-angka. Semi (1993) juga menguraikan penelitian deskriptif, artinya data terurai dalam bentuk kata-kata, dan umumnya berupa pencatatan atas kutipan-kutipan, bukan berbentuk data angka. Objek material penelitian ini adalah tujuh puisi Darmanto Jatman dalam *Sori Gusti* yang berjudul “Pidato Ki Lurah Karangkedempel Sewaktu Menerima Mahasiswa KKN di Desanya” (1980); “Meener Trans, Mevrouw Trans, Matur Nuwun, Dank U Well, Terima Kasih, Thank You” (1995); “Harmoni itu Sepasang Sandal Jepit”; “Amanat Buat Mereka yang Pindah Abad”; dan “Hong Wilaheng Niatingsun Memayu Hayuning Bangsa dan Negara” (2001).

Dalam tahap penentuan objek penelitian, pemilihan puisi-puisi tersebut didasarkan atas kesamaan penggunaan multilingualitas dan bentuk narasi teks, yakni teks-teks puisi yang berbentuk teks pidato. Ketujuh teks puisi tersebut menghadirkan muatan neoimperialisme secara konsisten meskipun masing-masing memiliki porsi yang berbeda. Proses analisis dan pemahaman data dalam penelitian ini dikaji dengan memanfaatkan teori dekonstruksi Derrida untuk mengetahui jejak-jejak dekonstruksi dan aspek neoimperialisme yang memiliki keterkaitan dengan sejarah pergerakan rezim Orde Baru. Tahap analisis dibagi menjadi dua tahap. Pertama, analisis secara tekstual melalui identifikasi jejak-jejak teks dekonstruksi dalam tujuh puisi tersebut yang menunjukkan adanya kritik atas neoimperialisme di dalamnya. Pemaparan neoimperialisme ditunjukkan melalui pemanfaatan multilingualitas dan bentuk teks pidato pada puisi yang terpilih. Setelah mengetahui jejak-jejak dekonstruksi dalam teks, analisis tahap kedua dilakukan dengan cara membongkar, membalikkan, dan mengontekstualisasikan sejarah serta bentuk kekuasaan yang tergambarkan di dalam tujuh puisi tersebut. Kemudian, tahap selanjutnya yaitu dilakukan proses pelacakan makna dari hasil dekonstruksi.

## PEMBAHASAN

### Konsep Bahasa dalam Tradisi Kesusasteraan Indonesia

Dalam sejarah kesusasteraan Indonesia, sastra Indonesia merupakan lanjutan dari kesusasteraan Melayu yang berkembang di Kepulauan Riau dan Sumatra sejak abad ke-19. Hasil pertemuan antara bahasa, sastra Melayu, dan kebudayaan Eropa modern melahirkan bahasa Indonesia dan sastra Indonesia. Rosidi (2018: 21-22) mengungkapkan perbedaan antara sastra nusantara dan sastra Indonesia. Menurutnya, sastra nusantara adalah hasil tulisan sastra yang menggunakan bahasa-bahasa daerah yang terdapat di seluruh wilayah nusantara, sedangkan sastra Indonesia ditulis dalam bahasa nasional Indonesia saja.

Pernyataan tersebut perlu digarisbawahi untuk meninjau kembali batas wilayah yang membedakan antara sastra nusantara dan sastra Indonesia, yaitu bahasa sebagai mediumnya. Sastra Indonesia identik menggunakan bahasa Indonesia sebagai sarana (media) dalam penyampaiannya. Pemakaian bahasa Indonesia sebagai unsur terpenting dan penanda untuk membedakan jenis kesusasteraan Indonesia dengan kesusasteraan lainnya. Pada tradisi sastra konvensional, sarana

pengungkapan sastra hanyalah menggunakan satu bahasa, yakni bahasa Indonesia. Istilah bahasa Indonesia tidak dibatasi oleh pemanfaatan istilah-istilah baku saja, karena bahasa Indonesia memiliki berbagai macam ragam bahasa yang disesuaikan dengan perkembangan zamannya.

Pembatasan antara sastra nusantara, sastra Indonesia, dan sastra barat terlihat jelas jika ditinjau dari sejarah perkembangannya. Karya sastra dikatakan sebagai sastra nusantara apabila karya tersebut menggunakan bahasa-bahasa daerah di seluruh kepulauan nusantara sebagai media penyampaiannya, begitu juga konsep bahasa dalam sastra Indonesia dan sastra Barat. Karya sastra konvensional sangat mematuhi norma-norma atau aturan-aturan khusus dalam bersastra, termasuk model pemanfaatan bahasa. Bahasa dalam sastra konvensional konsisten menggunakan jenis bahasa yang sesuai dengan jenis kesusastraannya.

Dalam perkembangan sastra Indonesia konvensional, pengarang hanya memanfaatkan bahasa Indonesia sebagai sarana penyampaiannya tanpa memasukkan bahasa asing atau daerah ke dalamnya. Masuknya bahasa asing atau daerah dalam karya sastra sudah bukan lagi menjadi konsen dari sastra konvensional, karena fenomena tersebut telah meruntuhkan aturan-aturan atau norma-norma dari sastra konvensional itu sendiri.

### **Problematika Multilingualitas: Pelacakan Jejak dan Operasionalisasi Oposisi Biner dalam Struktur Linguistik *Sori Gusti***

Fenomena multilingualitas dalam khasanah sastra Indonesia bukan lagi menjadi hal baru bagi dunia sastra kontemporer. Permasalahan Multilingualitas dalam sastra seringkali diperbincangkan pada momen-momen tertentu seperti refleksi hari Sumpah Pemuda, pembahasan mengenai warna lokal dalam sastra, pemertahanan bahasa daerah melalui karya sastra, hingga masuknya bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia sebagai dampak dari globalisasi. Kayam (1981) memberikan contoh multilingualitas dalam karya Sastrawan Y.B. Mangunwijaya *Burung-Burung Manyar* dan Linus Suryadi *Pengakuan Pariyem* dengan meninjau berbagai macam aspek. Bagi Umar Kayyam, pemanfaatan multilingual dalam teks tidak hanya dilatarbelakangi oleh latar budaya pengarang yang kental dengan dunia Jawa dan pemahamannya terhadap Barat.

Amenangi zaman edan  
Ewuh aya ing pambudi  
Melu edan nora tahan  
Ning yen tan melu  
Boya keduman melik  
Kaliren wekasanipun  
Nanging sabje-bejane kang lali  
Luwih beja kang eling lawan waspada!  
(Jatman, 2002: 243).

Pemanfaatan beberapa bahasa asing dalam teks kelima teks puisi yang telah dipilih menunjukkan adanya dominasi melalui bahasa. Giles dan Middleton (2008) mendefinisikan imperialisme linguistik sebagai salah satu bentuk imperialisasi yang terjadi melalui media bahasa, bahasa mayoritas menguasai bahasa minoritas. Bahasa mayoritas memegang hegemoni atas bahasa-bahasa lainnya. *Sori Gusti* menghadirkan bahasa-bahasa yang kontras satu sama lain. Bahasa mayoritas terwakili oleh pemanfaatan bahasa-bahasa asing yang menjadi sentra dalam teks ini. Penguasaan melalui bahasa menunjukkan adanya kepentingan global yang mencoba dimasukkan dalam tatanan kultural lokal.

Bahasa Inggris merupakan bahasa persatuan global nomor satu yang memegang hegemoni tunggal, sehingga pemanfaatan bahasa Inggris digunakan untuk istilah-istilah global atau internasional. Bahasa Jepang dan bahasa Arab meskipun berasal dari Negara dunia ketiga memegang kedudukan yang hampir sama dengan bahasa Inggris. Bahasa Jepang mendunia karena Jepang menguasai produk teknologi. Pada beberapa teks *Sori Gusti*, penggunaan bahasa Jepang terlihat atas dihidirkannya produk-produk keluaran Jepang.

Begitu pula bahasa Arab menjadi alat penyebaran agama terbesar yang mayoritas masyarakat dunia meyakini, sehingga dalam beberapa teks *Sori Gusti* ditampilkan beberapa istilah berbahasa Arab yang mengarah pada istilah-istilah keislaman, seperti *zikir*, *salawat*, dan *do'a*. Bahasa Belanda memang tidak memiliki posisi dalam tataran internasional, tetapi posisi bahasa Belanda berasal dari negara barat yang orang-orangnya pernah menjadikan Indonesia sebagai negara jajahannya, sehingga bahasa Belanda memiliki posisi penting untuk mengacu pada istilah-istilah kolonial. Dari identifikasi pemanfaatan bahasa Belanda dapat diketahui bahwa Belanda pernah mendapat posisi utama di Indonesia dalam proses penguasaannya.

Yaa Nabi salam alaika/ Yaa Rasul salaam alaika/ Yaa Habib salam alaika/ Salawattullah alaika/ Asyroqol badru  
'alaina/ Faktafat minhul buduuru/ Mitsla husnik maa ro ainna/ Qoththu yaa wajhas suruuri.

Di hadapanku kedamaian/ Di belakangu kedamaian/ Di bawahku kedamaian/ Di atasku kedamaian.

.....

“Yes. How many ears must one man have/ Before he can hear people cry/ Yes. How many deaths will it take/  
Till he know that too many people have died”. “The answer my friend is blowing in the wind, the answer is  
blowing in the wind.”

(Jatman, 2002: 256–257)

Keempat bahasa asing tersebut memegang peranan penting di dunia global sebagai bahasa paling berpengaruh kecuali bahasa Belanda yang kehadirannya memiliki peranan khusus atas imperialisme kultural. Penguasaan bahasa tidak hanya ditunggalkan pada bahasa Inggris yang memiliki posisi dominan sebagai bahasa nomor satu di dunia global. Imperialisasi mulai memasuki negeri ini melalui bahasa-bahasa agama dan produk-produk luar yang mencoba menguasai pasar lokal. Hal ini membuktikan bahwa bahasa memiliki peranan penting untuk mudah dikendalikan oleh aktor-aktor imperialis. Imperialisasi melalui bahasa tidak hanya masuk dalam bentuk penguasaan politik-kultural, akan tetapi mereka juga merambah pada bidang ekonomi bahkan bidang militer.

Permainan keempat bahasa menunjukkan bahwa bahasa global dalam teks mendominasi atas pemakaian bahasa lokal dan bahasa Indonesia tersendiri. Masuknya bahasa asing ke dalam ranah kesusasteraan Indonesia memang untuk mengungkapkan artikulasi khusus yang tidak bisa diungkap melalui bahasa Indonesia (Lustantini, 2010: 87). Pernyataan seperti ini membuat fungsi bahasa Indonesia melemah, karena ada beberapa istilah yang tidak dapat diungkap secara khusus melalui bahasa Indonesia. Posisi bahasa Indonesia yang selama ini dijunjung tinggi sebagai bahasa persatuan dapat terdominasi oleh bahasa asing. Begitu pula dengan kemurnian sastra Indonesia secara konvensinya menempatkan bahasa Indonesia sebagai media penyampaiannya. Hal ini menunjukkan bahwa imperialisasi bentuk baru sudah masuk ke dalam ranah kita melalui politisasi bahasa, yakni bahasa digunakan sebagai senjata politik dan kepentingan.

Imperialisasi melalui bahasa dapat memperlihatkan bahwa dunia global lebih dominan dibanding dunia lokal. Keberagaman bahasa yang ditampilkan Darmanto, menurut Budianta (Budianta, 1998, p. 63) merupakan luasnya temporal spasial referensi budayanya, yang mengacu dari kolonial sampai globalisasi. Keberagaman bahasa Darmanto ditandai sebagai dampak kekuatan imperium yang mengakar kuat pada bangsa ini. Puisi-puisi Darmanto, menurut Triwikromo sebagai penyunting buku *Sori Gusti* merupakan *pertunjukan yang utuh* karena telah mengarungi medan atau arena bahasa yang tidak terbatas dan diksi yang tidak akan rampung. Artinya, keberagaman bahasa Darmanto adalah representasi hal yang menjadi substansi atau roh puisi-puisinya. Bentuk kegelisahan atas bentuk-bentuk penguasaan baru yang dirasakan oleh bangsa ini.

Pemanfaatan bahasa dalam teks *Sori Gusti* dapat diklasifikasi ke dalam empat kategori. Pertama, budaya. Pemanfaatan bahasa Asing mencoba masuk ke dalam tataran lokal dengan memasukkan unsur-unsur budaya global mulai dari nama-nama industri, produk-produk yang tren dan mendunia. Kemudian bahasa lokal dipakai dalam konteks menunjukkan budaya lokal yang sifatnya masih tradisional. Kedua, agama. Agama dalam teks juga dihadirkan melalui nyanyian keagamaan, zikir, mantra, kutipan kitab suci dan sebagainya. Agama mayoritas diwakili dengan

penggunaan bahasa Arab yang kemudian merujuk pada agama Islam sebagai agama terbesar pemeluknya. Bahasa lokal mewakili agama minoritas dengan dihidirkannya mantra, zikir, nyanyian keagamaan, doa-doa agama minor di Indonesia seperti Hindu, Buddha, dan Konghucu.

Ketiga, ideologi. Perkembangan budaya global dan penerapan bahasa asing dalam bentuk material yang sifatnya global menunjukkan bahwa ideologi yang dianut kebanyakan adalah kapitalisme. Di era globalisasi, masyarakat dituntut dalam bidang ekonomi yang telah dinyatakan dalam pemanfaatan bahasa asing tersebut. Kemudian masyarakat lokal masih memiliki kepercayaan tinggi kepada leluhur dan nenek moyang yang dibuktikan dengan mereka yang masih memegang teguh falsafah-falsafah Jawa. Keempat, politik. Dua bahasa yang saling bertentangan menggambarkan kondisi politik dalam teks. Dalam konteks dominasi, bahasa Belanda dihadirkan untuk menampakkan adanya bentuk penjajahan di masa lalu, sedangkan di era Orde Baru, bahasa Indonesia dihadirkan untuk menampakkan adanya kekuatan dan kekuasaan politik Orde Baru yang mencoba mengubah wacana lokal. Dari pemanfaatan keberagaman bahasa inilah muncul pertentangan-pertentangan dua hal seperti berikut.

Tabel 1. Aspek Keberagaman Bahasa

Aspek	Bahasa Asing (Dominasi)	Bahasa Lokal/ Nasional (Terdominasi)
Budaya	Global	Lokal
Agama	Agama Mayoritas	Agama Minoritas
Ideologi	Kapitalis	Tradisionalis/ Lokalitas
Politik	Imperial	Neoimperial

### ***Decentering* Bahasa: Pembangunan Konsep Baru**

Dari proses pelacakan jejak dan operasionalisasi oposisi biner melalui pemanfaatan enam bahasa yakni bahasa global yang terdiri atas bahasa Inggris, Jepang, Arab, Belanda, dan bahasa lokal yang terdiri dari bahasa Indonesia dan Jawa, maka pembalikan hierarki multilingualitas dapat dilihat dari empat aspek juga. Pertama, budaya. Konsep lama dalam aspek kebudayaan cenderung memusatkan segala sesuatu pada Barat/Global. Pada era globalisasi, penjajahan terjadi kembali memasuki labirin-labirin kultural dengan tindakan yang lebih halus. Revitalisasi terhadap aspek lokal yang dibangun dalam teks melalui konsistensi pemanfaatan bahasa daerah pada setiap teks. Aspek lokalitas dibangun kembali sebagai upaya terhadap kepentingan global yang mulai merambah pada segala bidang di Indonesia termasuk perindustrian.

Kedua, agama. Menurut konsep konvensional agama mayoritas dan terbesar di dunia adalah Islam. Bahasa Arab adalah alat ekspresi dan sebagai identitas masyarakat Islam yang sangat mendominasi di Indonesia. Kehadiran bahasa dan agama minoritas sebagai upaya mendamaikan antara keduanya. Agama mayoritas dan minoritas dalam teks ini digunakan secara selaras untuk menyampaikan pesan perdamaian, maka posisi bahasa-bahasa dari agama minoritas mencoba diangkat untuk menggambarkan kondisi multikultural atau keberagaman, terutama dalam konteks ke-Indonesiaan.

Ketiga, ideologi. Pemaparan tentang bahasa-bahasa asing yang dipakai dalam teks mengacu pada dunia perindustrian dan ekonomi global. Hal ini bertentangan dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia yang lebih mengedepankan kehidupan tradisional dan sosial. Bahasa-bahasa ragam metropolitan (prokem) dalam teks kedua sebagai bukti bahwa ideologi-ideologi global sudah

merambah ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Wacana lokalitas, mulai dari kearifan lokal hingga penanaman filosofi-filosofi Jawa, dibangun sebagai bentuk perlawanan atas globalitas.

Keempat, politik. Membicarakan politik selalu berkaitan dengan kekuasaan. Konsep kekuasaan mengalami perbedaan melihat dari kesinambungan sejarah yang dibangun oleh teks dan istilah-istilah multilingual yang menandakan kondisi suatu zaman. Dalam teks terlihat jelas bahwa Indonesia pernah dijajah di bawah kekuasaan Belanda. Wacana tersebut mulai bergeser setelah Indonesia merdeka secara politik. Pada rezim selanjutnya, Indonesia mengalami penguasaan oleh bangsanya sendiri baik secara material maupun kultural. Dari pemanfaatan multilingualitas dapat ditarik garis besar dan benang merah mengacu pada kondisi sosial politik yang ada di Indonesia. Tidak hanya itu, pemanfaatan multilingualisme juga memiliki relasi dengan bentuk teks dan wacana sejarah yang melatarbelakangi teks dalam membangun wacana-wacana neoimperialisme di dalamnya.

Tabel 2. Bentuk *Decentering* Bahasa dalam Puisi-puisi Darmanto Jt.

Aspek	Konsep Lama	Konsep Baru
Budaya	Global: Semua terpusat pada Barat	Revitalisasi aspek lokalitas menjadi upaya perlawanan terhadap globalisasi
Agama	Agama Mayoritas Islam dalam pandangan dunia	Agama minoritas menunjukkan keberagaman di Indonesia, yang tidak hanya terdiri atas satu agama mayoritas
Ideologi	Kapitalis: Ideologi pandangan Barat	Tradisionalis/ Lokalitas dibangun untuk melawan globalitas
Politik	Imperial (penjajahan) penuh di bawah instruksi Belanda	Neoimperial (penguasaan bentuk baru) sudah dipegang oleh aktor-aktor lokal sendiri

### Bentuk Pidato dalam Tipografi Puisi

Membahas konsep dasar pidato umumnya menyangkut kegiatan berbicara di depan umum untuk menyampaikan sebuah ide atau gagasan. Dalam sebuah arah dan senjata politik, pidato umumnya dilakukan melalui garis instruksi dari atas ke bawah, artinya pidato dipakai untuk membangun citra para elite untuk mempertahankan maupun menguatkan posisinya agar diterima oleh masyarakat luas. Pidato disampaikan untuk memberi sambutan pada agenda-agenda tertentu. Sehingga pidato memiliki kekhususan yang pastinya berbeda dengan kegiatan berbicara lainnya.

Pidato dalam realitanya tidaklah dekat dengan masyarakat menengah ke bawah (*inferior*). Pidato hanya dipakai pada agenda-agenda tertentu dan penutur biasanya bukan dari golongan *inferior*. Pidato umumnya disampaikan dari atasan ke bawahan. Penutur pidato adalah orang-orang yang memiliki kedudukan penting dan pengaruh terhadap masyarakat. Pidato umumnya untuk membangun kesan positif bagi orang-orang banyak. Namun, konsep pidato dalam *Sori Gusti* berbeda dengan konsep pidato umumnya melihat sudut pandang yang dipakai juga merebut posisi kekuasaan. Penutur pidato dalam *Sori Gusti* berbalik dengan konsep pada umumnya dengan sistematika yang pasti dan mapan sehingga pemanfaatan konsep pidato dalam *Sori Gusti* berbeda jauh dengan konsep pada umumnya.

Berbeda dari konsep puisi konvensional bahkan beberapa teks puisi kontemporer, bentuk narasi kelima teks puisi yang dipilih dalam penelitian ini merupakan kombinasi dari beberapa konsep puisi kontemporer. Berdasarkan cara penyair mengungkapkan ide maupun gagasan, kelima teks puisi ini mengombinasikan antara puisi naratif dan deskriptif. Kelima teks dikatakan puisi naratif karena gagasan yang disampaikan menyerupai pengungkapan suatu cerita tetapi teks tidak berbentuk epik, romansa, atau balada.

Di sisi lain, kelima teks berupa puisi deskriptif yang digunakan untuk mengemukakan tanggapan atas suatu hal atau keadaan, karena puisi-puisi ini mengandung unsur ironi dan satire (kritik) (Suryaman, dkk., 2012: 26-28). Selain itu, kelima teks puisi dalam *Sori Gusti* ini berbentuk



teks pidato yang jarang ditemukan dalam khazanah kesusasteraan Indonesia yang bergenre puisi. Dari bentuk narasi inilah diduga ada indikasi tersendiri terkait kekuatan teks untuk mengungkapkan sesuatu yang tersembunyi.

### **Pelacakan Jejak dan Oposisi Biner melalui Bentuk Tipografi *Sori Gusti***

Pidato disampaikan oleh seorang pemimpin di depan umum. Asumsi inilah yang mendasari berlangsungnya dominasi baru melalui teks. Jika gambarannya seperti itu, garis intruksi yang didapat adalah pidato disampaikan dari atasan ke bawahan. Bentuk pidato kelima teks puisi *Sori Gusti* memiliki keteraturan yang berbeda-beda tetapi secara garis besar keseluruhan teks mengikuti konsep pidato umumnya yakni terdapat pembuka pidato, isi, dan penutup. Isi kelima teks pidato sama-sama menjelaskan sejarah Indonesia, terutama mengacu pada Orde Baru sebagai wacana utama. Kebebasan cara pengungkapan bentuk teks menjadi cirinya sebagai karya sastra, meskipun kelima teks meminjam bentuk pidato sebagai media penyampaian gagasannya.

Saudara-saudara  
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  
Syalom, Shanti, Sancai, Slamet!  
Tentrem rahayu wonten ing sampeyan sedaya  
Tentrem rahayu langit, tentrem rahayu bumi,  
Tentrem rahayu darat, tentrem rahayu bukit,  
Tentrem rahayu desa, tentrem rahayu kota,  
Tentrem rahayu orang tua, tentrem rahayu anak-anak . . . hayu rahayu  
memayu hayu bayu.  
(Jatman, 2002: 254)

Dalam teks pertama pidato dalam puisi “Pidato Ki Lurah Karangkedempel Sewaktu Menerima Mahasiswa KKN di Desanya” (1980) disampaikan seorang Lurah yang disimbolkan dengan Semar Badranaya dari Desa Karangkedempel kepada para mahasiswa yang akan menjalankan KKN di desanya. Teks kedua disampaikan oleh Bilung, dalam pewayangan Jawa Bilung adalah teman dari punakawan yang menggambarkan dirinya sebagai rakyat biasa. Ketiga teks selanjutnya subjek lirik tidak diketahui tetapi dari sudut pandang yang terdapat dalam puisi, subjek lirik mengarah pada masyarakat biasa yang menginginkan sebuah perdamaian. Subjek lirik dalam puisi keseluruhannya berasal dari lapisan masyarakat yang paling bawah atau tidak memiliki jabatan apapun.

Selain itu, subjek lirik sering menyebut nama beberapa tokoh-tokoh dalam teks. Kehadiran tokoh-tokoh dalam kelima teks puisi *Sori Gusti* memegang kuasa atas arah dari konsep pidato yang ditawarkan dalam teks. Dari identifikasi atas sudut pandang ini akan diketahui fungsi dari pidato sehingga dapat dibaca dikotomi subjek-objek lirik dalam teks puisi. Konsep pidato tidak lagi berfungsi murni sebagaimana pidato umumnya yakni sebagai sarana penyampai gagasan, ide, dan pendapat yang disampaikan dari atas ke bawah.

Pidato dalam kelima teks *Sori Gusti* disampaikan dari masyarakat, rakyat, atau orang biasa dari golongan menengah ke bawah, sedangkan beberapa tokoh yang disebut dalam teks atau mitra tutur dari pidato adalah mereka yang berasal dari golongan menengah ke atas. Beberapa teks juga menyebutkan golongan menengah untuk menyambung garis kekuasaan tersebut seperti mahasiswa dan kehadiran kaum-kaum intelektual. Selain itu, ada tokoh yang konsisten dihadirkan dalam keempat teks tersebut yakni R. M. P Sosrokartono.

Ada indikasi bahwa Darmanto memasukkan ideologi-ideologi khas R.M. P Sosrokartono dalam teks untuk menjaga lokalitas di tengah perkembangan global, karena sosok Sosrokartono adalah orang Indonesia pertama kali yang mengampu pendidikan di Leiden Belanda dengan mampu menjaga kulturnya sebagai orang Indonesia, khususnya orang Jawa. Konsistensi kehadiran R. M. P Sosrokartono bisa jadi pengarang ingin membawa ideologi yang menjadi pedoman hidup R. M. P

Sosrokartono sebagaimana yang telah dipaparkan melalui pemanfaatan multilingualitas atas beberapa filosofi-filosofi Jawa yang diambil dari pedoman hidup R. M. P Sosrokartono.

Teks pidato pertama dalam “Pidato Ki Lurah Karangkedempel Sewaktu Menerima Mahasiswa KKN di Desanya” (1980) disampaikan oleh wakil rakyat ditujukan ke beberapa pihak elite politik yang menguasai pada saat program pembangunan dicanangkan. Arah pidato ini berbeda dengan konsep pidato umumnya sebagai sarana perpolitikan para pejabat untuk membangun citra diri. Pidato dalam teks ini disampaikan dari garis vertikal bawah ke atas sebagai sarana kritik, juga untuk menyampaikan keluh kesah masyarakat kecil atas represi yang dilakukan oleh kalangan elite politik.

Teks pidato kedua dalam puisi “Meener Trans, Mevrouw Trans Matur Nuwun, Dank U Wel, Terima Kasih, Thank You” (1995) menunjukkan bahwa garis kekuasaan para elite lokal sangat kuat. Konsep pidato mengarah pada upaya kritik terhadap kekuasaan dan sentralisasi yang dilakukan oleh para elite lokal tidak lepas dari pengaruh Belanda dalam hal mengeksploitasi masyarakat kecil baik secara tenaga maupun hak-hak mereka dirampas. Pertentangan antara tokoh subjek lirik (Bilung) dengan elite lokal dan elite Belanda dibungkus dengan model satire sehingga konsep pidato akan lebih bisa diterima oleh masyarakat.

Ketiga teks pidato selanjutnya dalam puisi “Harmoni Itu Sepasang Sandal Jepit”; “Amanat buat Mereka yang Pindah Abad”; dan “Hong Wilaheng Niatingsun Memayu Hayuning Bangsa & Negara” (2001) adalah pidato perdamaian sehingga memunculkan objek tersebut untuk menampakkan kembali penindasan, kerusuhan, dan kejahatan yang dilakukan oleh para elite politik. Ketiga teks di atas memiliki kesamaan juga dalam menampilkan tokoh-tokoh yang terlibat dan bentuk teks pidato perdamaian. Subjek lirik dalam teks mengarah pada masyarakat inferior sedangkan tokoh-tokoh yang dipertentangkan oleh subjek lirik adalah elite Orde Baru sebagai pemegang kekuasaan tunggal telah melahirkan berbagai tragedi dan penindasan dalam negeri ini.

Tabel 3. Gambaran Oposisi Biner

Teks	Konstruksi Konvensional	
	Subjek/ Pusat	Objek/ Pinggiran
“Pidato Ki Lurah Karangkedempel Sewaktu Menerima Mahasiswa KKN di Desanya” (1980)	Superior (Presiden, Menteri, Rektor, Dosen, kaum intelektual, ahli, pakar keilmuan)	Inferior (Rakyat)
“Meneer Trans, Mevrouw Trans Matur Nuwun, Thank You, Dank U Wel, Terima Kasih” (1995)	Ratu Beatrice dari Kerajaan Belanda, elite lokal pelaku transmigrasi	Bilung (Rakyat)
“Harmoni Itu Sepasang Sandal Jepit” (1998)	Elite Politik Orde Baru	Inferior (masyarakat biasa/ rakyat)
“Amanat buat Mereka yang Pindah Abad”	Elite Politik Orde Baru	Inferior (masyarakat biasa/ rakyat)
“Hong Wilaheng Niatingsun Memayu Hayuning Bangsa & Negara” (2001)	Elite politik Orde Baru (Presiden, TNI, ABRI, Polisi)	Inferior (masyarakat biasa/ rakyat)

### ***Decentering Vertikal-Horisontal dalam Tipografi Pidato *Sori Gusti****

Bentuk narasi *Sori Gusti* juga sebagai alat komunikasi politik di masanya. Pidato adalah salah satu strategi membangun aura positif bagi seorang pemimpin. Penggunaan bentuk pidato dalam sebuah teks puisi jelas memiliki maksud tertentu, yang salah satunya adalah sebagai alat perlawanan atas dominasi kekuasaan pada saat Orde Baru. *Sori Gusti* secara jelas menampakkan adanya kekuasaan Orde Baru dengan cara memimpin yang terkesan otoriter. Konsep pidato umumnya hanya digunakan untuk berbicara di depan umum dalam menyatakan sebuah pendapat.

Konsep pidato dalam *Sori Gusti* ibarat panggung demokrasi yang direalisasikan dalam sebuah teks. Subjek lirik berupaya menyuarakan pendapatnya dalam kesempatan yang tidak dibatasi oleh

ruang. Konsep pidato dalam puisi adalah kritik atas suara yang terbungkam di era Orde Baru. Bentuk narasi ini kemudian diangkat sebagai sarana orasi untuk memberikan gagasan yang tidak akan terbatas oleh apapun. Namun, pembungkusan pidato dalam karya sastra tidak akan berfungsi sebagaimana pidato murni karena media penyampaiannya memakai bahasa imajiner yang sebagian mengalami pengaburan dan tidak mudah ditangkap langsung oleh pembaca.

Keberadaan puisi-puisi *Sori Gusti* dan beberapa karya yang lahir di Orde Baru menjadi sarana penyampaian pendapat yang aman dari teror Orde Baru, karena pada saat itu barang siapa yang berani menentang kekuasaan Orde Baru, kehidupannya akan terancam. Bentuk teks *Sori Gusti* disesuaikan dengan konteks zamannya. Selain sebagai alat pembebasan, *Sori Gusti* hadir untuk mengaburkan realita yang dibungkam oleh kekuasaan. *Sori Gusti* kemudian muncul sebagai antitesa realita yang pada waktu itu tidak bisa diselesaikan secara terang-terangan. Maka dari itu, bentuk teks dalam *Sori Gusti* tidak hanya melahirkan konsep baru pada struktur puisi kontemporer, *Sori Gusti* juga memberi kontribusi dalam dunia politik bangsa untuk menyuarakan masyarakat yang selama ini ditindas oleh bangsanya sendiri.

Bentuk teks dari kelima puisi di atas menunjukkan adanya pembalikan subjek-objek sebagai strategi kritik atas garis kekuasaan antara penguasa dan yang dikuasai. Konsep *pidato* dipinjam oleh sastra sebagai media untuk menyuarakan pendapat. Penghancuran konsep *pidato* yang lama dengan membangun pidato sebagai sarana kritik bagi masyarakat biasa atau rakyat. *Pidato* yang awalnya sebagai alat perpolitikan para petinggi negara sengaja dipakai untuk menghancurkan posisi pidato itu sendiri. Fungsi *pidato* dibalikkan sebagai alat ekspresi yang selama ini terbungkam.

Tabel 4. Bentuk Dekonstruksi Puisi-puisi Darmanto Jt.

Teks	Bentuk Dekonstruksi	
	Konsep Lama	Konsep Baru
“Pidato Ki Lurah Karangkedempel Sewaktu Menerima Mahasiswa KKN di Desanya” (1980)	Superior (Presiden, Menteri, Rektor, Dosen) sebagai pendengar dan target kritik oleh Inferior	Inferior (Lurah sebagai wakil rakyat yang memiliki posisi paling rendah di antara Superior) sebagai orang yang berpidato dan mengkritik
“Meneer Trans, Mevrouw Trans Matur Nuwun, Thank You, Dank U Wel, Terima Kasih” (1995)	Ratu Beatrice dari Kerajaan Belanda sebagai pendengar dan target sindiran serta kritik oleh Inferior	Bilung dari Koninklijke Leger (Tentara Kerajaan) sebagai pelapor dan pengkritik atas warisan kultural Belanda kepada Indonesia
“Harmoni Itu Sepasang Sandal Jepit” (1998)	Elite Politik Orde Baru	Anonim dari Inferior (masyarakat biasa/ rakyat) untuk memberikan wejangan atas pentingnya perdamaian dan mengkritik atas kekerasan suatu rezim
“Amanat buat Mereka yang Pindah Abad”		
“Hong Wilaheng Niatingsun Memayu Hayuning Bangsa & Negara” (2001)		

### ***Sori Gusti* dan Muatan Neoimperialisme Orde Baru**

*Sori Gusti* hadir bertepatan dengan momentum Orde Baru memimpin, sehingga kemunculannya dilatarbelakangi oleh kondisi politik Orde Baru yang kuat. Pada saat itu, tulisan-tulisan yang dianggap membahayakan pemerintah dibersihkan dan dilarang peredarannya. Satu-satunya alat kritik yang masih bisa diterima adalah sastra. Sastra dan politik akhirnya hadir

berdampingan, meskipun pada awal kemunculannya di masa kolonial keduanya tidak pernah bisa dipersatukan. Penerbitan Balai Pustaka milik pemerintah melarang karya sastra bermuatan ideologi, agama dan politik tertentu diterbitkan. Semua itu dianggap sebagai “bacaan liar” (Taum, 2015: 1).

Kehadiran *Sori Gusti* berupaya merekonstruksi dirinya sebagai rekam jejak sejarah. *Sori Gusti* merangkum peristiwa-peristiwa Orde baru menjadi sastra yang bermuatan politik, agama, hingga ideologi. Sebagian dalam *Sori Gusti* juga memaparkan sejarah klasik Jawa untuk menggambarkan kesamaan kondisi sosial, budaya, dan politik suatu zaman. *Sori Gusti* merelasikan kekuasaan yang selalu hadir di sebuah sistem pemerintahan, baik di era politik kerajaan Jawa hingga rezim Orde Baru.

*Sori Gusti* mengangkat kisah sejarah dalam bingkai estetika. Taum (2015: 12) menyatakan bahwa karya sastra tidak serta merta menjadi karya imajinasi untuk mengisi waktu luang dan hiburan semata-mata, melainkan merekonstruksi dinamika, pergulatan, dan pergumulan hidup manusia Indonesia dalam ruang dan waktu historis. *Sori Gusti* merangkum tragedi-tragedi Orde Baru dan meramunya ke dalam bentuk puisi. Karya sastra yang bermuatan sejarah umumnya banyak tercatat dalam bentuk prosa. Puisi dalam sejarah kesusasteraan sebelum era Orde Baru jarang bahkan belum bersinggungan dengan fenomena-fenomena sejarah dan politik. Tema puisi masih berkisar romantisme, spiritualitas, perjuangan, pergulatan hidup manusia, dan lainnya.

Neoliberalisme atau bentuk kekuasaan baru adalah salah satu catatan sejarah Orde Baru. Dalam konsep lamanya, aktor imperialisme berasal dari negara-negara penjajah, semisal Belanda yang telah menjajah Indonesia. memasuki rezim Orde Baru, bentuk kekuasaan dan kekerasan kembali terjadi dengan aktor yang berbeda dan berasal dari negeri sendiri. Kekuasaan dipegang secara tunggal oleh aktor-aktor Orde Baru. Elite pribumi memiliki posisi penting untuk menindas sesamanya. Kelima teks *Sori Gusti* menampakkan fenomena neoliberalisme yang terjadi di era Orde Baru.

Tak ada tanah sela tanpa pembantaian, penindasan, dan pelanggaran HAM. Di Timtim, di Ambon, di Irian Jaya, bahkan di Aceh sana. Malahan yang disebut orang yang normal adalah mereka yang menyatakan perang secara resmi;

Melawan kolonialisme Belanda; Melawan Separatisme DI/TII, PRRI  
Permesta; melawan PKI yang coup d'etat; Melawan Masyarakat kecil Kedung Ombo dan mahasiswa yang tak henti demonstrasi menuntut reformasi.  
(Jatman, 2002: 257)

Neoliberalisme kultural dapat dilihat dalam program kerja yang dicanangkan oleh Orde Baru. Teks “Pidato Ki Lurah Karangkedempel Sewaktu Menerima Mahasiswa KKN di Desanya” menampakkan neoliberalisme melalui eksploitasi masyarakat desa di balik program pembangunan Revolusi Hijau dan Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin ditandai sebagai awal kemunculan neoliberalisme Orde Baru. Kemudian teks “Meneer Trans, Mevrouw Trans Matur Nuwun, Dank U Wel, Terima Kasih, Thank You” memuat neoliberalisme melalui program transmigrasi yang sudah bergeser dari konsep aslinya sebagai program pemerataan penduduk. Program ini membuka peluang besar bagi elite Jawa untuk menguasai daerah lain.

Ketiga teks puisi yakni “Harmoni Itu Sepasang Sandal Jepit”, “Amanat buat Mereka yang Pindah Abad”, dan “Hongwilaheng Niatingsun Memayu Hayuning Bangsa & Agama” menampakkan neoliberalisme melalui bentuk kekerasan dan penindasan yang dilakukan oleh Orde Baru. Ketiga teks puisi tersebut merekam bentuk neoliberalisme berada dalam puncaknya. Nyawa manusia terancam oleh kejamnya rezim Orde Baru. Penindasan, kekerasan, dan pelanggaran HAM tidak lagi direnggut oleh penjajah dari Belanda, semua kejadian diakibatkan oleh kepentingan-kepentingan rezim yang memerintah pada saat itu.

Kita terlanjur percaya kemerdekaan mesti diperjuangkan dengan sendjata – atau kalau tidak, kita akan jadi bangsa yang tidak mandiri, "self reliance" malah selalu "medicancy", mengemis-ngemis. Jadi kita mesti siap angkat senjata lagi: *Civis pacem parabellum!*  
Siap mendengar teriakan: "Tembak!", dan tentu saja seruan "Serbu!". Sembari mendengar mars perang yang bertalu-talu!  
(Jatman, 2002: 258)

Melihat kronologi sejarah yang ada di Indonesia, ada keberulangan sejarah pada setiap rezimnya. Sori Gusti merekam bentuk kekerasan dan kekuasaan mulai dari sejarah kerajaan Jawa, praktik kolonial Belanda, dan rezim Orde Baru. Dalam sejarah Jawa, kekerasan menjadi senjata utama melumpuhkan musuh untuk merebut atau menegakkan kekuasaan. Pada era kolonialisasi Belanda, eksploitasi tenaga kerja, penanaman kerja paksa, dan peperangan juga merupakan bentuk kekerasan untuk menegakkan kekuasaan di bumi Indonesia. Di era Orde Baru kekerasan kembali terjadi untuk menegakkan kekuasaan pemerintah dan pengalihan isu untuk menyelamatkan pemimpin Orde Baru dari masalah-masalah yang dihadapi.

Keberulangan itu menunjukkan bahwa dalam menegakkan kekuasaan, kekerasan tidak dapat dihindari dalam tradisi sejarah di Indonesia. Pasca kemerdekaan, Indonesia seharusnya sudah merdeka secara keseluruhan. Meskipun secara politik sudah dinyatakan merdeka dari kuasa Belanda, Indonesia mengalami bentuk penguasaan baru yang dilakukan oleh aktor-aktor lokal sendiri, baik dari pemimpin Negara, pemilik modal lokal, hingga beberapa oknum yang mendukung keduanya.

### **Makna Dekonstruksi dalam *Sori Gusti***

Multilingualitas hadir juga sebagai upaya mendamaikan perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Multilingualitas merupakan gambaran dari konsep keberagaman yang harus diterima tanpa meninggalkan tradisi. Keberagaman dalam segi apapun tidak selalu bernilai negatif. Keberagaman budaya, agama, kepercayaan, dan ras tidak dapat dihindari di Indonesia, walaupun budaya global yang mulai masuk ke ranah lokal. Pendamaian keberagaman menjadi penting agar budaya luar tidak mendominasi dalam perkembangannya. Keberagaman dinilai penting dan bersinggungan dengan semboyan yang dianut oleh masyarakat Indonesia untuk menciptakan irama dalam kehidupan.

Pidato dimaknai sebagai konsep kekuasaan. Pidato dalam hal ini memiliki dua arah. Pidato dalam konsep aslinya adalah sarana ekspresi pemimpin dalam menyampaikan gagasannya, tetapi dalam kumpulan puisi ini dibalikkan sebagai sarana kritik dari masyarakat biasa kepada pemimpin. Pidato menentukan arah kekuasaan dan kekuatan baik ditinjau dalam konsep sebenarnya maupun konsep dalam puisi ini. Kadangkala *pidato* digunakan untuk pembersihan diri para petinggi negeri agar memperoleh kekuasaannya kembali. *Pidato* memang menjadi sarana efektif untuk mencari dukungan dan pujian dari massa. *Pidato* pun merepresentasikan sebuah posisi dan selalu berkonotasi pada sebuah kewibawaan dan sikap bijak.

Neoimperialisme dalam kumpulan puisi dinilai dekat dengan konsep kekerasan yang selalu melahirkan penindasan, pembantaian, pelanggaran, dan pembunuhan. Bentuk neoimperialisme pada awalnya tidak terlihat secara nyata, tetapi ketika kekuasaan seoran pemimpin akan jatuh, neoimperialisme semakin membentuk perlakuan kekerasan. Melalui strategi pembacaan dekonstruksi dapat diketahui bahwa bentuk penguasaan dari luar tidak selamanya mendominasi dan mengekang masyarakat lokal. Barat tidak selalu berkonotasi buruk, kejam, dan menakutkan, dan lokal adalah suatu 'kedamaian' karena dipandang sebagai 'rumah sendiri'. Kekuasaan dan kekerasan dapat berangkat dari aktor-aktor lokal, bahkan saudara yang tinggal di bawah tujuan yang sama dapat menindas saudara yang lainnya. Maka di sini kebaikan dan keburukan bersifat relatif. *Baik* dan *buruk* tidak selamanya menjadi konsep permanen. Apa yang datang dari luar tidak selamanya merugikan ataupun 'buruk', dan apa yang datang dari dalam tidak selamanya 'melindungi', 'menyelamatkan', atau 'membawa kebaikan'.

## SIMPULAN

*Decentering* dalam *Sori Gusti* terungkap melalui dekonstruksi atas konsep multilingualitas dan pidato sebagai strategi pembacaan teks. Bentuk multilingualitas dan konsep pidato dalam teks menunjukkan sebuah pembelajaran baru bagi dunia sastra Indonesia terutama genre puisi dan memperkaya khasanah kesusasteraan Indonesia. Multilingualitas membangun keberagaman konteks yang diselaraskan dengan teks. Multilingualitas tidak hanya bertujuan untuk mengangkat wacana lokal dalam teks, namun juga sebagai upaya pendamaian keberagaman budaya yang mulai masuk ke dalam kehidupan lokal. Bentuk pidato menandakan kekuasaan suatu rezim yang dinarasikan dalam suatu teks, bahwa pidato adalah salah satu sarana kritik yang paling strategis terhadap para superior untuk menggambarkan konteks yang berkaitan.

Pemanfaatan multilingualitas dan konsep pidato merupakan alat kritik atas hadirnya neoimperialisme Orde Baru. Neoimperialisme yang ditampilkan dalam teks bergeser dari konsep aslinya. Aktor-aktor imperialisme baru berasal dari lokal. Bentuk neoimperialisme yang terjadi di era Orde Baru tidak selalu berbentuk kultural saja, dapat juga berupa kekerasan atau secara fisik dan material. Kekuasaan dan kekerasan dalam catatan sejarahnya selalu mengalami pengurangan. Keberulangan sejarah menunjukkan bahwa sejarah membawa pembelajaran dalam kehidupan. Sejarah tidak selalu dimaknai sebagai sesuatu yang telah berlalu. Sesuatu yang telah berlalu bisa jadi sebagai awal dalam sebuah cerita kehidupan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budianta, M. (1998). Oposisi Biner dalam Wacana Kritik Pascakolonial. Makalah Dalam Kolokium “Mempersoalkan Pascakolonialisme”, Balai Seminar Dewan Bahasa Dan Pustaka, Kuala Lumpur.
- Derrida, J. (2016). *Of Grammatology*. John Hopkins University Press.
- Giles, J., & Middleton, T. (2008). *Studying Culture: A Practical Introduction*. Wiley-Blackwell.
- Faruk. (2012). *Metode Penelitian Sastra: Sebuah Penjelajahan Awal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Foulcher, K. (2020). *Komitmen Sosial dalam Sastra dan Seni: Sejarah Lekra 1950—1965*. Pustaka Pias.
- Jabarohim. (2003). *Metodologi Penelitian Sastra*. Hanindita.
- Jatman, D. (2002). *Sori Gusti*. Semarang: Limpad.
- Kayam, U. (1981, Oktober). *Multilingualisme dalam Sastra*. Ceramah dan Diskusi Peringatan Sumpah Pemuda Universitas Negeri Surakarta, Surakarta.
- Lustantini, S. (2010). Pemertahanan Bahasa Daerah: Studi Kasus Bahasa Jawa dalam Karya Sastra Indonesia, *Jurnal Magister Linguistik RPs UNDIP*, 83–88. <http://mli.undip.ac.id>
- Moleong, J.L. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Norris, C. (2003). *Membongkar Teori Dekonstruksi Jacques Derrida*. Ar-Ruzz. <https://doi.org/10.4135/9781446261590>
- Rendra, W. S. (1980). *Potret Pembangunan dalam Puisi*. Lembaga Studi Pembangunan.
- Sastrowardoyo, S. (1982). *Daerah perbatasan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rosidi, A. (2018). *Ikhtisar Sejarah Sastra Indonesia*. Dunia Pustaka Jaya.
- Semi, M. A. (1993). *Metode Penelitian Sastra*. Angkasa.
- Suryaman, M., Wiyatmi, & Pratama, A. (2012). *Puisi Indonesia*. Penerbit Ombak.
- Taum, Y. Y. (2015). *Sastra dan politik: Representasi Tragedi 1965 dalam Negara Orde Baru*. Sanata Dharma University Press.
- Thukul, W. (2004). *Aku Ingin Jadi Peluru: Sajak-Sajak*. Magelang: Indoensia Tera.
- Thukul, W. (2014). *Nyanyian Akar Rumput: Kumpulan Lengkap Puisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.